



<https://ntt.bps.go.id>

Indeks Kemahalan Konstruksi

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2024

Volume 4, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<https://ntt.bps.go.id>

Indeks Kemahalan Konstruksi

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2024

Volume 4, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2024

Volume 4, 2024

Katalog : 7102025.53

Nomor Publikasi : 53000.24060

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv+54 halaman

Penyusun Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pembuat Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber Ilustrasi : *freepik.com*

**Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini
untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

TIM PENYUSUN
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2024
Volume 4, 2024

Pengarah : Matamira B. Kale, S.Si, M.Si
Penanggung Jawab : Demarce M. Sabuna, SST, SE, M.Si
Penyunting : Putu Dita Pickupana, SST, M.IT
Pengolah Data dan Penulis Naskah : Arya Dwi Anjasmara Purbaningrum, S.Tr.Stat
Penata Letak : Arya Dwi Anjasmara Purbaningrum, S.Tr.Stat

<https://ntt.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

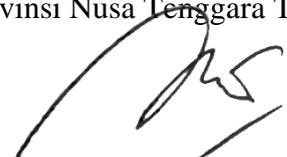
Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT yang menyajikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuannya. Kota acuan yang digunakan tahun 2024 adalah Kota Banjarmasin. Pertimbangan dalam memilih kota acuan didasarkan pada nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional dan kelengkapan data serta mempertimbangkan faktor pendukung lainnya.

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) yang dilakukan secara triwulanan di Provinsi NTT pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2023 serta triwulan I dan triwulan II tahun 2024. Selain itu, dalam penghitungan IKK juga menggunakan data dari *Bill of Quantity* (BoQ), Buku AHSP dari Kementerian PUPR, serta data realisasi APBD. Data IKK tahun 2024 digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 nantinya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, terutama kepada perusahaan atau responden yang telah membantu kelancaran Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) sehingga publikasi ini bisa diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi sebagian harapan pengguna data. Berbagai saran dan masukan sangat kami harapkan untuk publikasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Kupang, Oktober 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Matamira B. Kale, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2024
Volume 4, 2024

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Cakupan.....	2
1.4 Konsep dan Definisi	2
1.4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi	2
1.4.2 Produsen.....	2
1.4.3 Pedagang besar/grosir	2
1.4.4 Pedagang campuran	2
1.4.5 Pedagang eceran.....	3
1.4.6 Bahan bangunan atau konstruksi	3
1.4.7 Kegiatan Konstruksi.....	3
1.4.8 Sewa Alat Berat	3
1.5 IKK Tahun 2023.....	3
2 METODOLOGI.....	5
2.1 Konsep Pemikiran IKK	5
2.2 Metode Penghitungan IKK.....	6
2.3 Diagram Timbang IKK	8
2.4 Prosedur Penghitungan Penimbang.....	10
3 ULASAN	13
3.1 Gambaran Umum Provinsi NTT	13
3.1.1 Kondisi Geografis	13

3.1.2	Transportasi.....	14
3.1.3	Pendapatan Regional.....	15
3.2	Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi NTT	17
3.3	IKK Provinsi NTT.....	19
3.4	IKK Kabupaten/Kota se-NTT	21
	DAFTAR PUSTAKA	25
4	LAMPIRAN	27

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
Tabel 2 Perkembangan Jumlah Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022–2023	15
Tabel 3 Perkembangan Jumlah Penerbangan dan Penumpang Pesawat Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022–2023	15
Tabel 4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023	16
Tabel 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023	16
Tabel 6 Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023–2024	18
Tabel 7 Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024	22

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Klasifikasi Sektor Konstruksi	9
Gambar 2 Alur Proses Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2024	12
Gambar 3 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2024	19
Gambar 4 Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2024	20
Gambar 5 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024	21
Gambar 6 Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi 2024 dan Dana Alokasi Umum 2024 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024.....	23

<https://ntt.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi (Kota Makassar=100), 2021	28
Lampiran 2 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi (Kota Makassar=100), 2022	29
Lampiran 3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi (Kota Makassar = 100), 2023	30
Lampiran 4 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi (Kota Banjarmasin = 100), 2024	31
Lampiran 5 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Makassar = 100), 2021	32
Lampiran 6 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Makassar = 100), 2022	33
Lampiran 7 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Makassar = 100), 2023	34
Lampiran 8 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Banjarmasin = 100), 2024	35
Lampiran 9 Kuesioner VHKK2024.MNPL	36
Lampiran 10 Kuesioner VHKK2024.MP	41
Lampiran 11 Kuesioner VHKK2024.SAU	50
Lampiran 12 Infografis Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah (Otda) yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otda adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Kebijakan Otonomi Daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemerataan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

1.2 Tujuan

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan provinsi lainnya di Indonesia.

1.3 Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021–2024.

1.4 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan dalam IKK yang merupakan dasar yang juga digunakan dalam Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK). Data yang dikumpulkan melalui SHKK menjadi komponen utama dalam penghitungan IKK.

1.4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didefinisikan sebagai suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan hargabarang/jasa konstruksi suatu kota acuan.

1.4.2 Produsen

Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Produsen dalam IKK adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.

1.4.3 Pedagang besar/grosir

Pedagang besar/grosir adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran. Pedagang grosir dalam IKK adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan secara grosir.

1.4.4 Pedagang campuran

Pedagang campuran adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga baik secara grosir maupun eceran.

1.4.5 Pedagang eceran

Pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung pada konsumen. Pedagang eceran dalam kegiatan IKK adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada rumah tangga secara eceran.

1.4.6 Bahan bangunan atau konstruksi

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

1.4.7 Kegiatan Konstruksi

Kegiatan Konstruksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang tercatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

1.4.8 Sewa Alat Berat

Harga sewa alat berat konstruksi didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini merupakan sewa selama 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.

1.5 IKK Tahun 2023

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *Bill of Quantity* (BoQ) tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako

ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2021 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan data BoQ tahun 2020.

IKK tahun 2024 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2023, Oktober 2023, Januari 2024, dan April 2024. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2024 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Kota acuan pada penghitungan IKK 2024 adalah Kota Banjarmasin. Kota acuan yang digunakan berbeda dengan kota acuan yang digunakan pada periode 2021–2023 yaitu Kota Makassar. Kota acuan IKK sebelum itu adalah Kota Semarang yang menjadi Kota Acuan perhitungan IKK periode 2018 – 2020 dan Kota Surabaya untuk penghitungan IKK 2015–2017. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

BAB II METODOLOGI

2.1 Konsep Pemikiran IKK

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing.

Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

2.2 Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_l = \sum_{m=1}^n p_m q_m$$

Dengan:

NK_l = nilai komponen ke-l pada masing-masing sistem dari suatu bangunan di kab/kota

p_m = Harga material/upah/sewa alat ke-m

q_m = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-m

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-l

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_l = \alpha_x C_x + \beta_l P_l + \varepsilon_{xl}$$

Dengan

NK_l = Nilai Komponen ke-l

C_x = dummy kabupaten/kota ke-x

P_l = dummy komponen ke-x dalam suatu sistem dan bangunan

ε_{xl} = galat

α_x dan β_l = Koefisien regresi

$$PPP (\text{Purchasing Power Parity})_{sistem_i} = \exp(\alpha_i)$$

$$PPP_{sistem_k} = \left(\prod_{l=1}^n \frac{NK_{klx}}{NK_{kl0}} \right)^{1/n}$$

Dengan

PPP_{sistem_k} = *purchasing power parity* sistem ke-k

NK_{klx} = nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kab/kota ke-x

NK_{kl0} = nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kab/kota acuan

n = jumlah komponen dalam suatu sistem

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan_j} = \left(\prod_{k=1}^n PPP_{sistem_k} \right)^{w_{2k}}$$

Dengan

$PPP_{bangunan_j}$ = *purchasing power parity* bangunan ke-j

n = jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek_i} = \left(\prod_{j=1}^n PPP_{Bangunan_j} \right)$$

Dengan

PPP_{proyek_i} = *purchasing power parity* proyek ke-i

n = jumlah bangunan dalam suatu proyek

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada disekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_0 = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{Proyek_i})^{w_{1i}} \right) \cdot 100$$

Dengan

n = jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

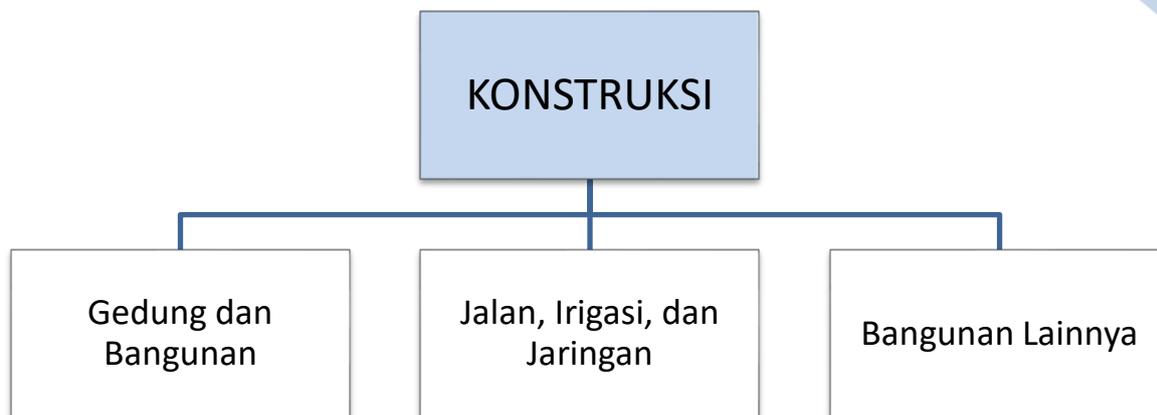
2.3 Diagram Timbang IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap intermediate dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan.

Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dengan biaya yang murah (menggunakan *Bill of Quantity* / BoQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.



Gambar 1 Klasifikasi Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana dapat dilihat pada gambar diatas. Gedung dan bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal yang meliputi rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal yang meliputi konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.

Untuk klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian (pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, viaduk, bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan).
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan Pelabuhan.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi.

Jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya diantaranya: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Jenis penimbang tersebut adalah sebagai berikut:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk material, upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

2.4 Prosedur Penghitungan Penimbang

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Penghitungan IKK sudah menggunakan data BoQ terbaru. Untuk IKK tahun 2024 menggunakan penimbang yang lebih lengkap yaitu menggunakan *updating* dari BoQ tahun 2023.

BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing. Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a. Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing dokumen BoQ yang dikumpulkan.
 - b. Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ
 - c. Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ. Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan
- ### 2. Menghitung masing-masing tahapan penimbang setiap kabupaten/kota

Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada dua jenis yakni penimbang material dan penimbang sistem. Penimbang material digunakan untuk menghitung nilai komponen yaitu volume dari material, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Penimbang sistem digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu share nilai sistem dari setiap sistem yang ada dalam suatu bangunan.

Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2024 juga menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek.

Secara garis besar proses penghitungan IKK 2024 melalui beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ.
- b. Menghitung nilai komponen yakni jumlah dari perkalian antara data harga hasil survei harga kemahalan konstruksi (SHKK) dengan diagram timbang material.
- c. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.
- d. Melakukan rata-rata geometrik dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP Proyek.
- e. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP Proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2023 untuk memperoleh angka IKK.

Proses penghitungan IKK 2024 secara keseluruhan beserta dengan penggunaan penimbang dapat dilihat pada gambar berikut:

BAB III

ULASAN

3.1 Gambaran Umum Provinsi NTT

3.1.1 Kondisi Geografis

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang terletak di selatan khatulistiwa pada posisi 8° - 12° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. Luas wilayah daratan NTT sekitar 46.446,64 km².

Tabel 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ² /sq.km)	Persentase Luas (%)	Jumlah Pulau
1.	Sumba Barat	757,41	1,63	28
2.	Sumba Timur	6.984,01	15,04	78
3.	Kupang	5.136,51	11,06	19
4.	Timor Tengah Selatan	3.933,15	8,47	1
5.	Timor Tengah Utara	2.623,20	5,65	–
6.	Belu	1.127,25	2,43	–
7.	Alor	2.928,56	6,31	17
8.	Lembata	1.268,11	2,73	4
9.	Flores Timur	1.748,52	3,76	19
10.	Sikka	1.671,65	3,60	19
11.	Ende	2.085,24	4,49	6
12.	Ngada	1.735,64	3,74	28
13.	Manggarai	1.343,83	2,98	1
14.	Rote Ndao	1.286,45	2,77	120
15.	Manggarai Barat	3.129,00	6,74	244
16.	Sumba Tengah	1.789,66	3,85	14
17.	Sumba Barat Daya	1.383,31	2,98	–
18.	Nagekeo	1.396,16	3,01	3
19.	Manggarai Timur	2.389,53	5,14	–
20.	Sabu Raijua	460,96	0,99	6
21.	Malaka	1.109,16	2,39	–
22.	Kota Kupang	159,33	0,34	–
Jumlah		46.446,64	100,00	607

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024

Provinsi NTT berbatasan dengan: bagian Utara dengan Laut Flores, bagian selatan dengan Samudra Hindia, bagian barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bagian timur dengan Negara Timor Leste (RDTL). Provinsi NTT terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota yang terletak di tiga pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil, antara lain: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka di Pulau Timor, Kab. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat daya (SBD) di Pulau Sumba, Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur di Pulau Flores, serta Kab. Alor, Lembata, Rote Ndao, dan Sabu Raijua pada pulaunya masing-masing.

Sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia, sarana transportasi utama yang digunakan ada beberapa. Akses menuju ibukota provinsi NTT (Kota Kupang) ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk kabupaten/kota yang berada di Pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka). Untuk kabupaten lain harus menggunakan jalur laut maupun udara yang didukung oleh 24 pelabuhan laut dan 14 bandara udara.

3.1.2 Transportasi

Dengan kondisi geografis yang berupa kepulauan, sarana transportasi menjadi lebih krusial dalam pembangunan di Provinsi NTT. Sarana dan prasarana mengalami perkembangan dan semakin berkembang tahun 2022-2023 di Provinsi NTT. Data statistik perhubungan menunjukkan bahwa tahun 2023 jumlah kendaraan terbanyak di NTT adalah sepeda motor yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai wilayah kepulauan, kehadiran sarana transportasi laut sangat dibutuhkan masyarakat. Kapasitas daya angkutnya yang besar, murah, dan dapat menembus daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau sarana transportasi udara merupakan alasan pentingnya armada laut. Ada 2 macam armada laut yang melayani masyarakat di wilayah NTT yaitu kapal ferry dan kapal laut. Perbedaannya, kapal ferry atau dikenal juga sebagai kapal penyeberangan, umumnya hanya melayani angkutan antar pulau dalam wilayah NTT, sedangkan kapal laut jangkauannya lebih luas hingga luar provinsi. Pada periode 2023 jumlah pelayaran kapal laut di NTT sebanyak 62.216 kunjungan dengan jumlah penumpang naik sebesar 2.157.372 penumpang dan 2.040.319 penumpang turun.

Tabel 2 Perkembangan Jumlah Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022–2023

No	Rincian	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kunjungan Kapal Laut	48.861	62.216
2.	Penumpang Naik	1.716.333	2.157.372
3.	Penumpang Turun	1.669.380	2.040.319

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024

Selain angkutan laut, angkutan udara juga menjadi salah satu pilihan dalam transportasi bagi penduduk di NTT. Tahun 2023 terjadi peningkatan penggunaan angkutan udara dibandingkan tahun 2022. Tahun 2022 jumlah kedatangan adalah sebesar 20.275 dan keberangkatan di NTT menjadi sebesar 20.272, sedangkan jumlah penumpang datang naik menjadi 1.424.401 dan jumlah arus penumpang berangkat naik menjadi 1.371.347.

Tabel 3 Perkembangan Jumlah Penerbangan dan Penumpang Pesawat Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022–2023

No	Rincian	2022		2023	
		Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pesawat	19.020	19.021	20.275	20.272
2.	Arus Penumpang	1.273.476	1.226.285	1.424.401	1.371.347

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024

3.1.3 Pendapatan Regional

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator yang sering digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah. Ada dua sistem nilai yang digunakan dalam menghitung PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) pada setiap tahun penghitungan dan atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. PDRB ADHB umumnya digunakan untuk mengamati struktur ekonomi di wilayah yang bersangkutan, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengamati pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023, PDRB ADHB NTT telah mencapai 128,52 triliun rupiah, meningkat sekitar 9,80 triliun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 118,72 triliun rupiah. Sementara itu, PDRB ADHK NTT mencapai 75,26 triliun rupiah pada tahun 2023, atau meningkat sekitar 2,57 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 72,69 triliun rupiah. PDRB ADHB per kapita NTT mencapai 23,08 juta rupiah pada tahun 2023. Angka ini juga meningkat 1,42 juta rupiah bila dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 21,66 juta rupiah.

Tabel 4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023

No	Rincian	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PDRB ADHB (Triliun Rp)	110,88	118,72	128,52
2.	PDRB ADHK (Triliun Rp)	70,54	72,69	75,26
3.	PDRB per Kapita (Juta Rp)	20,55	21,66	23,08
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,52	3,05	3,52

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Lapangan Usaha, 2019–2023

Catatan: *angka sementara; **angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi yang mengukur tingkat pertumbuhan nilai tambah dalam suatu perekonomian, memberikan indikasi tentang perkembangan produksi kegiatan perekonomian dalam suatu periode tertentu. Perekonomian NTT pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,52 persen. Artinya aktivitas ekonomi agregat di NTT meningkat 3,52 persen dibandingkan tahun 2022.

Tabel 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2023

(Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sumba Barat	2.416,82	2.583,33	2.785,69
2.	Sumba Timur	6.406,50	6.829,54	7.328,40
3.	Kupang	7.988,62	8.483,35	9.157,63
4.	Timor Tengah Selatan	8.243,25	8.810,39	9.496,21

No	Kabupaten/Kota	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Timor Tengah Utara	4.222,70	4.493,42	4.819,44
6.	Belu	4.699,02	5.035,59	5.480,55
7.	Alor	3.166,96	3.363,48	3.635,60
8.	Lembata	1.912,15	2.016,52	2.138,31
9.	Flores Timur	5.380,27	5.643,38	6.062,05
10.	Sikka	5.317,52	5.702,89	6.194,67
11.	Ende	6.314,66	6.792,62	7.374,38
12.	Ngada	3.578,33	3.819,39	4.114,02
13.	Manggarai	4.810,27	5.097,27	5.502,19
14.	Rote Ndao	3.279,26	3.517,01	3.746,67
15.	Manggarai Barat	3.611,64	3.883,61	4.254,98
16.	Sumba Tengah	1.230,40	1.303,39	1.397,92
17.	Sumba Barat Daya	3.888,12	4.176,33	4.499,90
18.	Nagekeo	2.347,31	2.487,14	2.669,96
19.	Manggarai Timur	3.412,90	3.649,68	3.937,51
20.	Sabu Raijua	1.450,94	1.545,74	1.638,48
21.	Malaka	2.929,90	3.144,30	3.422,18
22.	Kota Kupang	24.410,23	26.199,55	28.478,36

Sumber: Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024

Catatan: *angka sementara; **angka sangat sementara

Jika membandingkan data PDRB ADHB antara kabupaten/kota di Provinsi NTT, pada tahun 2023 wilayah dengan PDRB tertinggi adalah Kota Kupang dengan 28,478 triliun rupiah. Mengingat Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi NTT dan juga pusat perekonomian, maka wajar jika dari sisi PDRB Kota Kupang ada pada peringkat teratas. Peringkat berikutnya adalah Kab. Timor Tengah Selatan dan Kab. Kupang yang memiliki PDRB 9,496 triliun rupiah dan 9,157 triliun rupiah secara berturut-turut.

3.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi NTT

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen pemerintah untuk mendorong pembangunan yang optimal dalam kerangka desentralisasi fiskal. Ada beberapa rincian untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa, diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus

Nonfisik (DAK Nonfisik), Dana Otsus, Dana Insentif Daerah (DID) Dana Otsus, Data Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY, serta Dana Desa. Seperti telah dijelaskan, IKK merupakan salah satu komponen dalam formulasi penghitungan DAU.

Tabel 6 Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (ribu Rupiah),
2023–2024

No	Nama Daerah	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Sumba Barat	392.091.153	416.210.567
2	Kab. Sumba Timur	629.874.293	672.396.863
3	Kab. Kupang	671.886.757	751.586.451
4	Kab. Timor Tengah Selatan	769.287.174	866.145.551
5	Kab. Timor Tengah Utara	584.999.041	654.919.866
6	Kab. Belu	490.426.520	527.359.875
7	Kab. Alor	595.255.500	658.532.348
8	Kab. Lembata	456.993.936	494.770.046
9	Kab. Flores Timur	616.246.259	681.097.648
10	Kab. Sikka	619.573.611	682.407.638
11	Kab. Ende	622.119.754	670.443.911
12	Kab. Ngada	459.595.690	505.782.691
13	Kab. Manggarai	596.299.361	670.187.420
14	Kab. Rote Ndao	438.961.153	464.932.554
15	Kab. Manggarai Barat	533.243.373	588.490.277
16	Kab. Sumba Tengah	347.722.198	364.998.204
17	Kab. Sumba Barat Daya	503.064.938	575.826.082
18	Kab. Nagekeo	426.686.732	472.273.452
19	Kab. Manggarai Timur	523.366.021	578.943.104
20	Kab. Sabu Raijua	354.686.749	372.040.600
21	Kab. Malaka	442.936.788	472.556.836
22	Kota Kupang	660.918.921	738.371.756
23	Nusa Tenggara Timur	1.857.019.095	1.984.240.864
Jumlah		13.593.255.017	14.864.514.604

Sumber: Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menurut Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, ditetapkan TKD sebesar 857,600 triliun rupiah termasuk di dalamnya yaitu Dana Desa sebesar 71,000 triliun rupiah. Di Provinsi NTT sendiri tahun 2023, jumlah DAU

adalah sebesar 13,593 triliun rupiah. Terjadi kenaikan DAU pada tahun 2024 menjadi 14,864 triliun rupiah.

Pada tahun anggaran 2023, wilayah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAU tertinggi adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 769,28 milyar rupiah, Kabupaten Kupang dengan 671,88 milyar rupiah, dan Kota Kupang dengan 660,91 milyar rupiah. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun anggaran 2024 dimana tiga penerima teratas adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 866,14 milyar rupiah, Kabupaten Kupang dengan 751,58 milyar rupiah, dan Kota Kupang dengan 738,37 milyar rupiah.

3.3 IKK Provinsi NTT

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

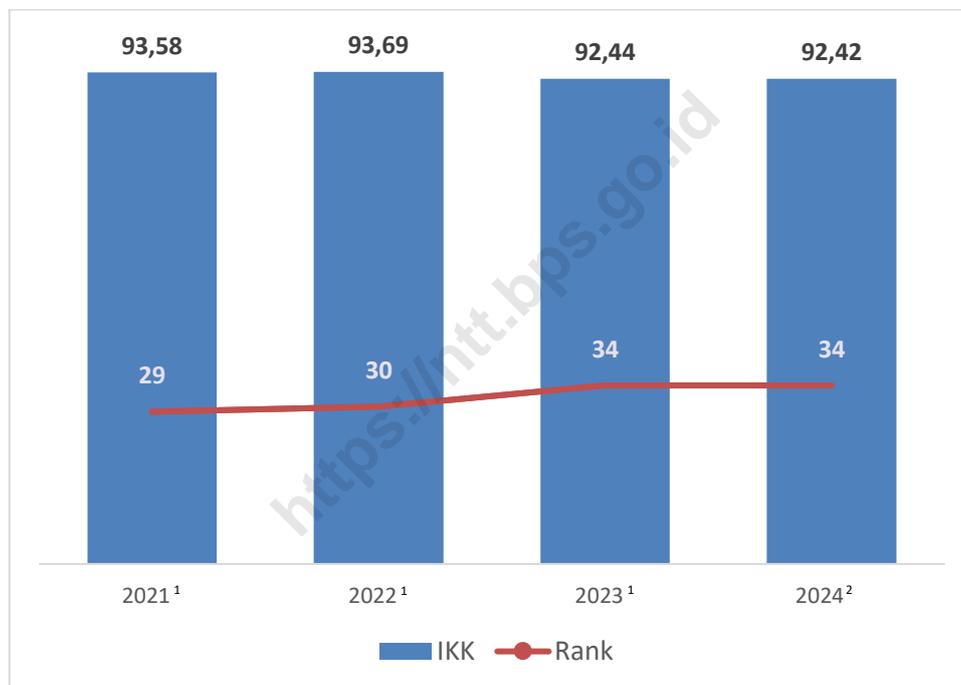


Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabuapten/Kota 2024

Gambar 3 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2024

Tahun 2024 dengan Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan sebagai Kota acuannya, nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi NTT adalah 92,42. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai bahan komoditas konstruksi, upah jasa konstruksi maupun sewa alat berat secara umum lebih rendah 7,58 persen dibandingkan dengan Kota Makassar. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, ranking IKK Provinsi NTT adalah 34 dari 38 provinsi. Lima peringkat atas secara berturut tahun 2024 adalah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ranking Provinsi NTT tidak mengalami perubahan dimana tahun 2023 dan tahun 2024 ranking IKK Provinsi NTT adalah 34 dari 38 provinsi.



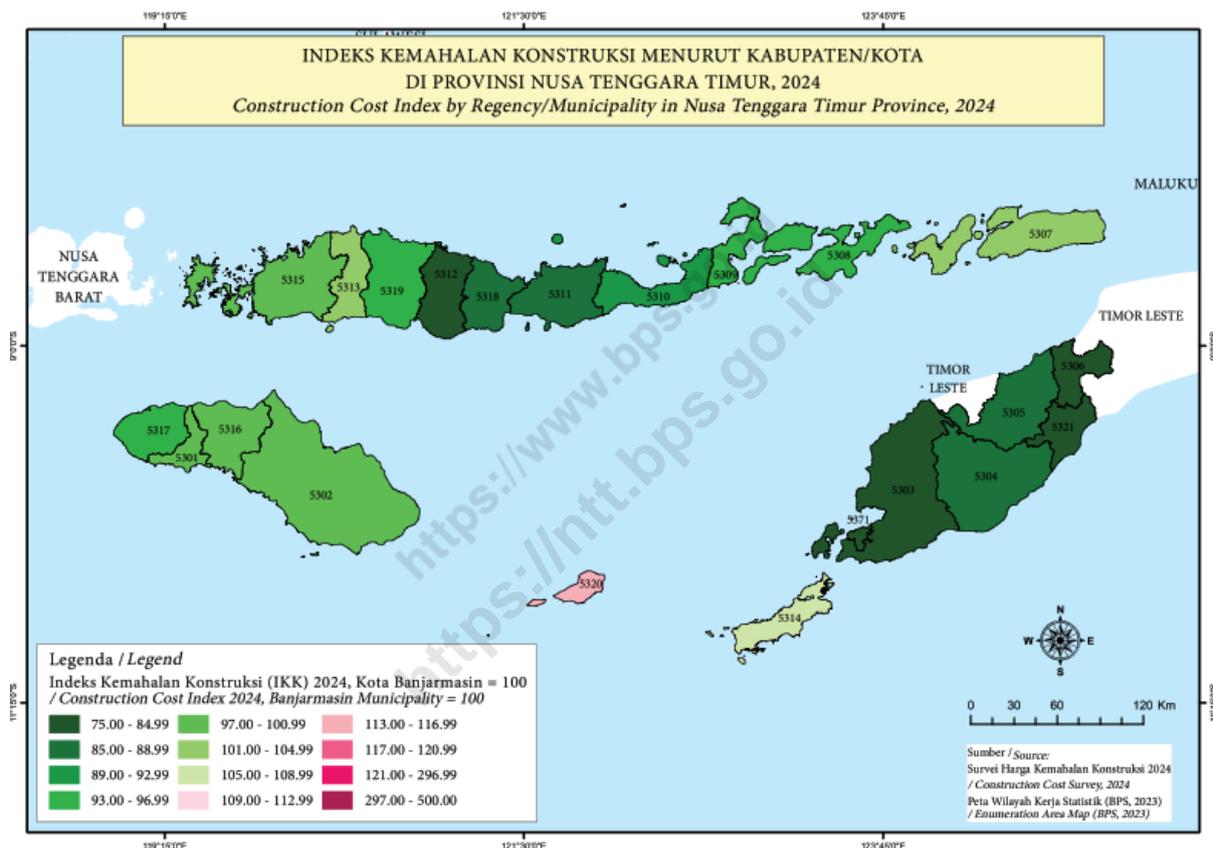
Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabuapten/Kota 2020-2023
Catatan: ¹Kota Acuan Makassar; ²Kota Acuan Makassar

Gambar 4 Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021–2024

IKK merupakan indeks spasial yang membandingkan data dalam satu waktu antar wilayah, bukan data series seperti misalnya data penduduk. Kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan atau penurunan harga barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan bahwa kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan, dan begitu juga penurunan IKK.

3.4 IKK Kabupaten/Kota se-NTT

IKK dihitung di seluruh 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Yang menempati peringkat pertama dalam ranking IKK tahun 2024 adalah Kabupaten Puncak dengan nilai IKK 379,81 diikuti dengan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya dengan nilai 342,93 dan 334,69 secara berturut-turut dimana ketiga wilayah tersebut ada di Provinsi Papua. Untuk peringkat terendah IKK tahun 2024 adalah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Provinsi NTT dengan nilai IKK 77,03 dan 80,07 secara berturut-turut.



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2024

Gambar 5 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Pada Provinsi NTT berdasarkan Gambar 5, beberapa wilayah di pulau Timor dan di Pulau Flores memiliki warna hijau gelap yang menandakan nilai IKK dibawah 89,00. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Belu (77,03), Kabupaten Malaka (80,07), Kabupaten Kupang (82,56), Kota Kupang (84,59), Kabupaten Ngada (84,89), Kabupaten Timor Tengah Utara (85,04), Kabupaten Nagekeo (86,04), Kabupaten Timor Tengah Selatan (86,09) dan Kabupaten Ende (86,78). Sebaliknya, ada wilayah yang memiliki warna hijau muda yang

berarti nilai IKK berada diatas 101,00. Wilayah tersebut diantaranya Kabupaten Rote Ndao (108,37), Kabupaten Alor (102,16), Manggarai (102,79) dan Sabu Raijua (115,55).

Tabel 7 Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5301	Kab. Sumba Barat	99,11
2	5302	Kab. Sumba Timur	97,82
3	5303	Kab. Kupang	82,56
4	5304	Kab. Timor Tengah Selatan	86,09
5	5305	Kab. Timor Tengah Utara	85,04
6	5306	Kab. Belu	77,03
7	5307	Kab. Alor	102,16
8	5308	Kab. Lembata	93,55
9	5309	Kab. Flores Timur	93,66
10	5310	Kab. Sikka	89,38
11	5311	Kab. Ende	86,78

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
12	5312	Kab. Ngada	84,89
13	5313	Kab. Manggarai	102,79
14	5314	Kab. Rote Ndao	108,37
15	5315	Kab. Manggarai Barat	99,67
16	5316	Kab. Sumba Tengah	98,03
17	5317	Kab. Sumba Barat Daya	96,60
18	5318	Kab. Nagekeo	86,04
19	5319	Kab. Manggarai Timur	93,70
20	5320	Kab. Sabu Raijua	115,55
21	5321	Kab. Malaka	80,07
22	5371	Kota Kupang	84,59

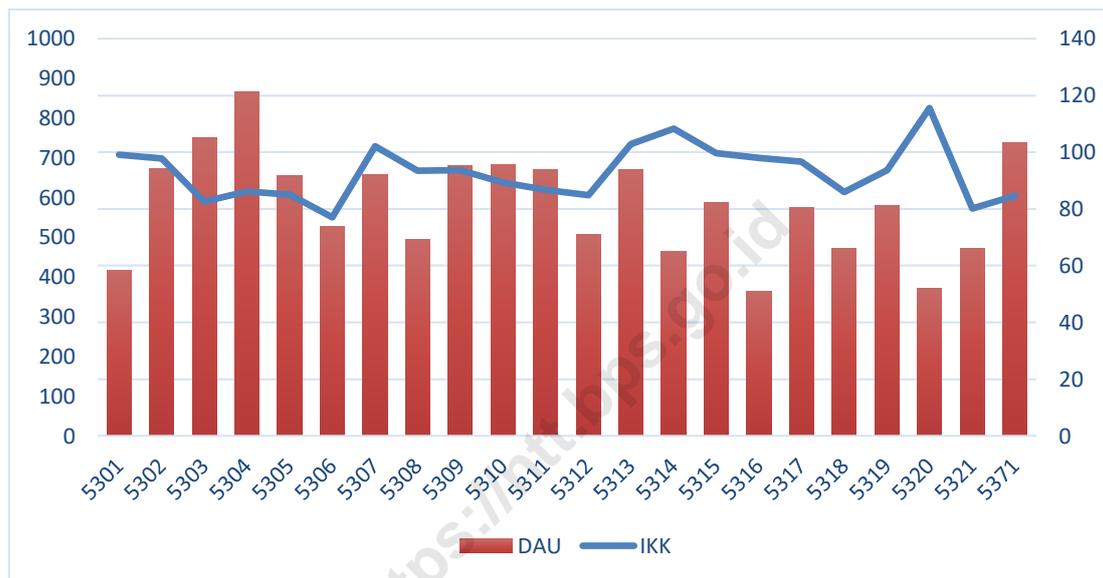
Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2024

Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang memiliki nilai IKK terendah di NTT secara geografis letaknya bersebelahan. Salah satu alasan yang menyebabkan nilainya rendah adalah karena di Kabupaten Belu terdapat pelabuhan besar dimana barang-barang kebutuhan disana didatangkan langsung dari sumbernya (Jawa atau Luar Negeri). Barang-barang tersebut tidak melalui daerah transit seperti Kota Kupang sehingga distribusinya lebih pendek dan harga cenderung lebih rendah.

Berlawanan arah dengan itu, untuk Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Rote Ndao yang memiliki nilai IKK tertinggi di NTT, merupakan wilayah kepulauan sendiri. Berbagai kebutuhan harus dipenuhi dengan mengimpor atau mendatangkan dari daerah lain sehingga harga cenderung lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk komoditas konstruksi. Ini juga mendorong harga untuk jasa konstruksi yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten Alor juga merupakan daerah kepulauan dengan kondisi kurang lebih sama tetapi ada beberapa komoditas yang didatangkan langsung dari sumbernya melalui pelabuhan yang

ada di ibukota kabupaten. Untuk Kabupaten Manggarai, harga lebih tinggi dikarenakan posisi ibu kota kabupaten (Ruteng) yang jauh dari pelabuhan dan akses melalui udara juga terbatas serta akses darat yang cukup jauh dari pelabuhan terdekat.

Sebagai salah satu komponen dalam formulasi DAU, nilai IKK berpengaruh dan biasanya sejalan dengan DAU yang dialokasikan. Namun, DAU disusun bukan hanya berdasar IKK tapi juga jumlah penduduk, IPM, luas wilayah, dan angka PDRB per kapita. Jadi tidak selalu apabila ranking IKK tinggi maka DAU yang dialokasikan juga tinggi. Ini tercermin dalam gambar berikut.



Gambar 6 Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi 2024 dan Dana Alokasi Umum 2024 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2024

Walaupun Kabupaten Sabu Raijua memiliki nilai IKK tertinggi, tapi tidak sejalan dengan alokasi DAU yang diterima. Luas wilayah, penduduk, dan lainnya juga menjadi faktor. DAU tertinggi tahun 2024 di NTT adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nilai 866,14 milyar rupiah dan nilai IKK 86,09 atau peringkat 15 dari 22 wilayah di NTT. Kabupaten Sabu Raijua memiliki nilai IKK tertinggi yaitu 115,55 dengan alokasi DAU tahun 2024 sebesar 372,04 milyar rupiah. Kabupaten Belu memiliki nilai IKK terendah yaitu 77,03 dengan nilai alokasi DAU sebesar sekitar 527,35 milyar rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024

- BPS. 2024. *Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2024. *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- BPS. 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023*. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Kemenkeu. 2023. *Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

<https://ntt.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://ntt.bps.go.id>

Lampiran 1 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi (Kota Makassar=100), 2021

No	Kode	Provinsi	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	99,03
2	1200	Sumatera Utara	101,63
3	1300	Sumatera Barat	94,77
4	1400	Riau	94,85
5	1500	Jambi	92,76
6	1600	Sumatera Selatan	91,58
7	1700	Bengkulu	94,42
8	1800	Lampung	92,57
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	101,21
10	2100	Kepulauan Riau	116,80
11	3100	DKI Jakarta	121,42
12	3200	Jawa Barat	102,60
13	3300	Jawa Tengah	97,65
14	3400	Di Yogyakarta	100,31
15	3500	Jawa Timur	100,80
16	3600	Banten	97,64
17	5100	Bali	103,17
18	5200	Nusa Tenggara Barat	101,93
19	5300	Nusa Tenggara Timur	93,58
20	6100	Kalimantan Barat	111,45
21	6200	Kalimantan Tengah	101,47
22	6300	Kalimantan Selatan	99,25
23	6400	Kalimantan Timur	109,81
24	6500	Kalimantan Utara	106,00
25	7100	Sulawesi Utara	104,43
26	7200	Sulawesi Tengah	90,50
27	7300	Sulawesi Selatan	96,84
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,38
29	7500	Gorontalo	95,07
30	7600	Sulawesi Barat	90,72
31	8100	Maluku	124,61
32	8200	Maluku Utara	112,31
33	9100	Papua Barat	130,59
34	9400	Papua	207,11

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2020

Lampiran 2 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi (Kota Makassar=100), 2022

No	Kode	Provinsi	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	100,59
2	1200	Sumatera Utara	103,40
3	1300	Sumatera Barat	97,66
4	1400	Riau	99,21
5	1500	Jambi	96,84
6	1600	Sumatera Selatan	92,04
7	1700	Bengkulu	95,65
8	1800	Lampung	90,46
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	102,78
10	2100	Kepulauan Riau	115,97
11	3100	DKI Jakarta	121,48
12	3200	Jawa Barat	105,97
13	3300	Jawa Tengah	100,63
14	3400	Di Yogyakarta	102,37
15	3500	Jawa Timur	100,02
16	3600	Banten	97,72
17	5100	Bali	104,74
18	5200	Nusa Tenggara Barat	104,44
19	5300	Nusa Tenggara Timur	93,69
20	6100	Kalimantan Barat	109,37
21	6200	Kalimantan Tengah	104,77
22	6300	Kalimantan Selatan	102,26
23	6400	Kalimantan Timur	115,65
24	6500	Kalimantan Utara	104,69
25	7100	Sulawesi Utara	104,74
26	7200	Sulawesi Tengah	92,50
27	7300	Sulawesi Selatan	95,22
28	7400	Sulawesi Tenggara	98,02
29	7500	Gorontalo	95,28
30	7600	Sulawesi Barat	87,44
31	8100	Maluku	107,97
32	8200	Maluku Utara	110,60
33	9100	Papua Barat	124,82
34	9400	Papua	192,57

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022

Lampiran 3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi (Kota Makassar = 100), 2023

No	Kode	Provinsi	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	97,38
2	1200	Sumatera Utara	98,81
3	1300	Sumatera Barat	94,15
4	1400	Riau	99,06
5	1500	Jambi	93,55
6	1600	Sumatera Selatan	91,39
7	1700	Bengkulu	93,27
8	1800	Lampung	88,65
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	103,94
10	2100	Kepulauan Riau	111,32
11	3100	DKI Jakarta	116,73
12	3200	Jawa Barat	104,08
13	3300	Jawa Tengah	100,19
14	3400	Di Yogyakarta	104,46
15	3500	Jawa Timur	98,47
16	3600	Banten	95,74
17	5100	Bali	103,4
18	5200	Nusa Tenggara Barat	102,01
19	5300	Nusa Tenggara Timur	92,44
20	6100	Kalimantan Barat	107,44
21	6200	Kalimantan Tengah	104,89
22	6300	Kalimantan Selatan	103,25
23	6400	Kalimantan Timur	115,58
24	6500	Kalimantan Utara	105,21
25	7100	Sulawesi Utara	101,62
26	7200	Sulawesi Tengah	91,96
27	7300	Sulawesi Selatan	95,88
28	7400	Sulawesi Tenggara	98,20
29	7500	Gorontalo	95,99
30	7600	Sulawesi Barat	91,94
31	8100	Maluku	108,12
32	8200	Maluku Utara	112,7
33	9100	Papua Barat	124,26
34	9200	Papua Barat Daya	121,87
35	9400	Papua	135,56
36	9500	Papua Selatan	138,42
37	9600	Papua Tengah	215,86
38	9700	Papua Pegunungan	251,25

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 4 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi (Kota Banjarmasin = 100), 2024

No	Kode	Provinsi	Nilai IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,61
2	1200	Sumatera Utara	97,45
3	1300	Sumatera Barat	93,06
4	1400	Riau	96,1
5	1500	Jambi	95,32
6	1600	Sumatera Selatan	90,62
7	1700	Bengkulu	94,2
8	1800	Lampung	89,12
9	1900	Kepulauan Bangka Belitung	105,37
10	2100	Kepulauan Riau	111,94
11	3100	DKI Jakarta	114,79
12	3200	Jawa Barat	105,3
13	3300	Jawa Tengah	102,08
14	3400	Di Yogyakarta	104,88
15	3500	Jawa Timur	96,29
16	3600	Banten	94,18
17	5100	Bali	107,46
18	5200	Nusa Tenggara Barat	104,09
19	5300	Nusa Tenggara Timur	92,42
20	6100	Kalimantan Barat	107,34
21	6200	Kalimantan Tengah	106,56
22	6300	Kalimantan Selatan	100,7
23	6400	Kalimantan Timur	118,3
24	6500	Kalimantan Utara	107,52
25	7100	Sulawesi Utara	100,77
26	7200	Sulawesi Tengah	91,82
27	7300	Sulawesi Selatan	95,91
28	7400	Sulawesi Tenggara	94,71
29	7500	Gorontalo	96,51
30	7600	Sulawesi Barat	91,63
31	8100	Maluku	106,52
32	8200	Maluku Utara	114,09
33	9100	Papua Barat	124,71
34	9200	Papua Barat Daya	122,21
35	9400	Papua	134,96
36	9500	Papua Selatan	142,98
37	9600	Papua Tengah	209,28
38	9700	Papua Pegunungan	249,12

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 5 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kota Makassar = 100), 2021

No	Kode	Kabupaten/Kota	Nilai IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	5301	Kabupaten Sumba Barat	96,14
2	5302	Kabupaten Sumba Timur	95,74
3	5303	Kabupaten Kupang	83,75
4	5304	Kabupaten Timor Tengah Selatan	91,57
5	5305	Kabupaten Timor Tengah Utara	83,12
6	5306	Kabupaten Belu	81,46
7	5307	Kabupaten Alor	101,01
8	5308	Kabupaten Lembata	100,28
9	5309	Kabupaten Flores Timur	99,77
10	5310	Kabupaten Sikka	88,62
11	5311	Kabupaten Ende	89,25
12	5312	Kabupaten Ngada	93,08
13	5313	Kabupaten Manggarai	101,18
14	5314	Kabupaten Rote Ndao	98,55
15	5315	Kabupaten Manggarai Barat	100,14
16	5316	Kabupaten Sumba Tengah	93,92
17	5317	Kabupaten Sumba Barat Daya	94,40
18	5318	Kabupaten Nagekeo	87,99
19	5319	Kabupaten Manggarai Timur	100,39
20	5320	Kabupaten Sabu Raijua	111,63
21	5321	Kabupaten Malaka	81,00
22	5371	Kota Kupang	92,44

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021

Lampiran 6 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kota Makassar = 100), 2022

No	Kode	Kabupaten/Kota	Nilai IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	5301	Kabupaten Sumba Barat	95,70
2	5302	Kabupaten Sumba Timur	96,26
3	5303	Kabupaten Kupang	83,62
4	5304	Kabupaten Timor Tengah Selatan	89,84
5	5305	Kabupaten Timor Tengah Utara	82,61
6	5306	Kabupaten Belu	81,85
7	5307	Kabupaten Alor	105,43
8	5308	Kabupaten Lembata	97,06
9	5309	Kabupaten Flores Timur	98,17
10	5310	Kabupaten Sikka	89,80
11	5311	Kabupaten Ende	90,05
12	5312	Kabupaten Ngada	90,10
13	5313	Kabupaten Manggarai	90,10
14	5314	Kabupaten Rote Ndao	105,60
15	5315	Kabupaten Manggarai Barat	105,60
16	5316	Kabupaten Sumba Tengah	99,57
17	5317	Kabupaten Sumba Barat Daya	99,57
18	5318	Kabupaten Nagekeo	100,12
19	5319	Kabupaten Manggarai Timur	100,12
20	5320	Kabupaten Sabu Raijua	96,61
21	5321	Kabupaten Malaka	96,61
22	5371	Kota Kupang	95,74

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022

Lampiran 7 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kota Makassar = 100), 2023

No	Kode	Kabupaten/Kota	Nilai IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	5301	Kabupaten Sumba Barat	94,72
2	5302	Kabupaten Sumba Timur	95,11
3	5303	Kabupaten Kupang	83,71
4	5304	Kabupaten Timor Tengah Selatan	88,03
5	5305	Kabupaten Timor Tengah Utara	82,95
6	5306	Kabupaten Belu	81,39
7	5307	Kabupaten Alor	102,16
8	5308	Kabupaten Lembata	92,89
9	5309	Kabupaten Flores Timur	94,08
10	5310	Kabupaten Sikka	87,14
11	5311	Kabupaten Ende	87,52
12	5312	Kabupaten Ngada	89,41
13	5313	Kabupaten Manggarai	103,74
14	5314	Kabupaten Rote Ndao	101,60
15	5315	Kabupaten Manggarai Barat	98,39
16	5316	Kabupaten Sumba Tengah	94,52
17	5317	Kabupaten Sumba Barat Daya	95,12
18	5318	Kabupaten Nagekeo	87,31
19	5319	Kabupaten Manggarai Timur	95,15
20	5320	Kabupaten Sabu Raijua	111,40
21	5321	Kabupaten Malaka	84,21
22	5371	Kota Kupang	89,38

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023

Lampiran 8 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kota Banjarmasin = 100), 2024

No	Kode	Kabupaten/Kota	Nilai IKK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	5301	Kabupaten Sumba Barat	99,11
2	5302	Kabupaten Sumba Timur	97,82
3	5303	Kabupaten Kupang	82,56
4	5304	Kabupaten Timor Tengah Selatan	86,09
5	5305	Kabupaten Timor Tengah Utara	85,04
6	5306	Kabupaten Belu	77,03
7	5307	Kabupaten Alor	102,16
8	5308	Kabupaten Lembata	93,55
9	5309	Kabupaten Flores Timur	93,66
10	5310	Kabupaten Sikka	89,38
11	5311	Kabupaten Ende	86,78
12	5312	Kabupaten Ngada	84,89
13	5313	Kabupaten Manggarai	102,79
14	5314	Kabupaten Rote Ndao	108,37
15	5315	Kabupaten Manggarai Barat	99,67
16	5316	Kabupaten Sumba Tengah	98,03
17	5317	Kabupaten Sumba Barat Daya	96,6
18	5318	Kabupaten Nagekeo	86,04
19	5319	Kabupaten Manggarai Timur	93,70
20	5320	Kabupaten Sabu Raijua	115,55
21	5321	Kabupaten Malaka	80,07
22	5371	Kota Kupang	84,59

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2024



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

VHKK2025.MNPL
MATERIAL NATURAL
DAN PRODUK LANJUTANNYA

SURVEI HARGA KEMAHALAN KONSTRUKSI

RAHASIA

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT

1. Provinsi	
2. Kabupaten/Kota*	
3. Nama Usaha/Responden	
4. Alamat Responden	
5. Nomor Teleponi/HP	
6. Kategori Responden	<input type="checkbox"/> Pedagang Grosir <input type="checkbox"/> Produsen <input type="checkbox"/> Pedagang Eceran <input type="checkbox"/> Dinas PU atau SKPD Lainnya <input type="checkbox"/> Jasa Penyewaan Alat Berat <input type="checkbox"/> Pemborong/Kontraktor

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS

URAIAN	JULI 2024	OKTOBER 2024	JANUARI 2025	APRIL 2025
1. Nama Pencacah				
2. ID Pencacah				
3. Tanggal Pencacah				
4. Tanda Tangan Pencacah				
5. Nama Pengawas				
6. NIP Pengawas				
7. Tanggal Pengawas				
8. Tanda Tangan Pengawas				

BLOK III : KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

URAIAN	JULI 2024	OKTOBER 2024	JANUARI 2025	APRIL 2025
1. Nama Pemberi Informasi				
2. Tanda Tangan				

PENJELASAN

- Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
- Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
- Responden harus berada di Ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
- Spesifikasi/kuualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
- Spesifikasi/kuualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kuualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.
- Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen pencacahan untuk menanyakan data harga komoditas amatan survei. Seluruh komoditas/kuualitas yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
- Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri online dari BPS RI. (<https://webentry.bps.go.id/shkk>).
- Dokumen yang sudah dientri disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTANNYA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Ukuran Satuan Setempat			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Keterangan	
					Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)							
Batu Pondasi ⁽¹⁾	Batu Gunung	m ³												
Batu Bata	Batu Bata tanah Liat (Bata Merah)	m ³		Buah										
Batako	Batako Berlubang (Hollow Block)	m ³		Buah										
				Buah										
				Buah										
Batako	Batako Tidak Berlubang (Solid Block)	m ³		Buah										
				Buah										
				Buah										
Bata Ringan	Cellicon atau Hebel	m ³		Buah										
Batu Split ⁽¹⁾	Ukuran 1 - 2 cm	m ³												

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTANNYA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Ukuran Satuan Setempat			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)						
Batu Split ¹⁾	Ukuran 2 - 3 cm	m ³											
Kayu Balok ²⁾ <i>(tidak dikaitam dan tidak dioven)</i>	Kayu kelas II	m ³											
		m ³											
	Kayu kelas III	m ³											
		m ³											
Kayu Papan ²⁾ <i>(tidak dikaitam dan tidak dioven)</i>	Kayu kelas II	m ³											
		m ³											
	Kayu kelas III	m ³											
		m ³											

Keterangan:

¹⁾Tanah uruk, pasir, batu pondasi, dan batu split merupakan material natural murni. Harga yang dicacah adalah harga di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang.

²⁾Jika kolom 5 = Ton, maka kolom 9 wajib terisi dan kolom 6, 7, dan 8 wajib terisi. Jika kolom 5 = Batang/Lembar/M²Lainnya, maka kolom 6, 7, dan 8 wajib terisi dan kolom 9 wajib tidak terisi.

BLOK V : CATATAN

<https://ntt.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

VHKK2025.MP
MATERIAL PABRIKAN

SURVEI HARGA KEMAHALAN KONSTRUKSI

RAHASIA

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT

1. Provinsi			
2. Kabupaten/Kota *			
3. Nama Usaha/Responden			
4. Alamat Responden			
5. Nomor Telepon/HP			
6. Kategori Responden	<input type="checkbox"/> Pedagang Grosir <input type="checkbox"/> Produsen	<input type="checkbox"/> Pedagang Eceran <input type="checkbox"/> Dinas PU atau SK/PP Lainnya	<input type="checkbox"/> Jasa Penyewaan Alat Berat <input type="checkbox"/> Pemborong/Kontraktor

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS

URAIAN	JULI 2024	OKTOBER 2024	JANUARI 2025	APRIL 2025
1. Nama Pencacah				
2. ID Pencacah				
3. Tanggal Pencacah				
4. Tanda Tangan Pencacah				
5. Nama Pengawas				
6. NIP Pengawas				
7. Tanggal Pengawas				
8. Tanda Tangan Pengawas				

BLOK III : KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

URAIAN	JULI 2024	OKTOBER 2024	JANUARI 2025	APRIL 2025
1. Nama Pemberi Informasi				
2. Tanda Tangan				

PENJELASAN

- Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
- Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
- Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
- Spesifikasi/kuualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
- Spesifikasi/kuualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kuualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.
- Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen pencacahan untuk menyanak data harga komoditas amatan survei. Seluruh komoditas/kuualitas yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
- Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa, dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri online dari BPS RI. (<https://webentry.bps.go.id/shkk>).
- Dokumen yang sudah diteliti disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN
 UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCAHAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Ukuran Satuan Setempat			Harga per satuan Setempat Juli 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Oktober 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Januari 2025 (Rp)	Harga per satuan Setempat April 2025 (Rp)	Keterangan
				Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Seng Gelombang GAJAH <i>(elephant, angasa, dll)</i>	Ukuran (0,02 x 80 x 180) cm	lembar	GAJAH								
	Ukuran (0,03 x 80 x 180) cm	lembar	GAJAH								
Paku	Paku Kayu 4" - 6"	Kg									
	Paku Triplek	Kg									
Semen Portland TIGA RODA <i>(grasik, padang, bonasa, dll)</i>	Portland Composite Cement (PCC) (SNI 15-7064-2004)	zak	TIGA RODA								
	Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d = 6 mm; p = 12 m	batang									
Besi Beton (Full SNI) SNI 07-2052-2002	Besi Beton Polos (BJTP 24) Ukuran d = 8 mm; p = 12 m	batang									

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN
 UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCAHAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Ukuran Satuan Setempat			Harga per satuan Setempat Juli 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Oktober 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Januari 2025 (Rp)	Harga per satuan Setempat April 2025 (Rp)	Keterangan
				Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Besi Beton (Full SNI) SNI 07-2052-2002	Besi Beton Ulir (BJTS 32) Ukuran d = 10 mm; p = 12 m	batang									
	Besi Beton Ulir (BJTS 32) Ukuran d = 16 mm; p = 12 m	batang									
Kloset TOTO (warna putih) (ms, duty, dll)	Kloset duduk standar (lengkap dengan tabung)	Buah	TOTO								
	Kloset Jongkok (untuk lantai bawah)	Buah	TOTO								
Seng Plat (warna silver)	Seng Plat BJLS 20; L = 40	m									
	Seng Plat BJLS 26; L = 90	m									
Pipa PVC WAVIN (warna putih) (rucka, masphon, vinilon, dll)	AW ø 1/2" panjang 4 m	batang	WAVIN								

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN
 UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Ukuran Satuan Setempat			Harga per satuan Setempat Juli 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Oktober 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Januari 2025 (Rp)	Harga per satuan Setempat April 2025 (Rp)	Keterangan										
				Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (kg)															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)										
Pipa PVC WAVIN (warna putih) <small>(rucika, maspion, vinilon, dll)</small>	AW \varnothing 3" panjang 4 m	batang	WAVIN																		
												D \varnothing 3" panjang 4 m	batang	WAVIN							
Kayu Lapis / Triplek (untuk bekisting)	Triplek/Plywood 4 mm	lembar																			
											Triplek/Plywood 9 mm	lembar	CATYLAC								
Cat Emulsi CATYLAC (warna dasar/putih) <small>(avitex, vinilex, dll)</small>	Cat Tembok Eksterior	Paill/ ember	CATYLAC																		
											Cat Tembok Interior	Paill/ ember	CATYLAC								

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN											
UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.											
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Ukuran Satuan Setempat			Harga per satuan Setempat Juli 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Oktober 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Januari 2025 (Rp)	Harga per satuan Setempat April 2025 (Rp)	Keterangan
				Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Cat Minyak AVIAN <i>(alfex, emco, dll)</i>	Cat Besi/Kayu	kg	AVIAN								
Cat Minyak ALTEX <i>(yoko, kembang, dll)</i>	Cat Meni Besi/Kayu	kg	ALTEX								
	Keramik Uk. 40 x 40 cm (putih polos)	dus	MULIA								
	Keramik Uk. 40 x 40 cm (wama/motif)	dus	MULIA								
	Granit Uk. 40 x 40 cm (putih polos)	dus	INDOGRESS								
	Granit Uk. 60 x 60 cm (putih polos)	dus	INDOGRESS								

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN
 UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMA DAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Ukuran Satuan Setempat			Harga per satuan Setempat Juli 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Oktober 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Januari 2025 (Rp)	Harga per satuan Setempat April 2025 (Rp)	Keterangan
				Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Genteng Metal	Genteng Metal (tebal 0,25 mm)	lembar	SAKURA ROOF								
SAKURA ROOF <i>(2 susun & tidak berpasir)</i>											
<i>(multiroof, sokarroof, dll)</i>	Genteng Metal (tebal 0,30 mm)	lembar	SAKURA ROOF								
			ASAHI								
Kaca	Kaca Polos Bening 3 mm	lembar									
ASAHI <i>(mulia, tossa, dll)</i>											
	Kaca Polos Bening 5 mm	lembar	ASAHI								
Gypsum	Gypsum Plafon 9 mm	lembar	JAYABOARD								
JAYABOARD <i>(elephant, insauf, dll)</i>											
Kabel	Kabel NYA Ukuran 1 x 1,5 mm ²	roll	ETERNA								
ETERNA <i>(supreme, extrana, dll)</i>											

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN
UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Ukuran Satuan Setempat			Harga per satuan Setempat Juli 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Oktober 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Januari 2025 (Rp)	Harga per satuan Setempat April 2025 (Rp)	Keterangan
				Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (kg)					
(1) Kabel ETERNA <i>(supreme, extrana, dll)</i>	(2) Kabel NYA Ukuran 1 x 2.5 mm ²	(3) roll	(4) ETERNA	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mesin Pompa Air (Otomatis) SHIMIZU <i>(sanyo, panasonic, dll)</i>	Pompa Shallow Pump (kedalaman s.d. 10 m) Daya output 125 watt	buah	SHIMIZU								
	Pompa Jet Pump (kedalaman > 26 m) Daya output 250 watt	buah	SHIMIZU								
Rangka Atap Baja	Profil Canal "C" Tipe C75.065	batang									
	Profil Canal "C" Tipe C75.075	batang									
Aluminium	Profil Kusen Aluminium 3 inci (openback)	batang	ALEXINDO								
ALEXINDO (warna silver) <i>(alco, damai abadi, dll)</i>	Profil Kusen Aluminium 4 inci (openback)	batang	ALEXINDO								

BLOK IV : DATA HARGA MATERIAL PABRIKAN											
UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.											
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Ukuran Satuan Setempat			Harga per satuan Setempat Juli 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Oktober 2024 (Rp)	Harga per satuan Setempat Januari 2025 (Rp)	Harga per satuan Setempat April 2025 (Rp)	Keterangan
				Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			PENGUIN								
Tangki Air Fiber PENGUIN <i>(profile, excell, dll)</i>	Ukuran 500 - 600 liter	buah									
	Ukuran 1000 – 1100 liter	buah	PENGUIN								
Lampu PHILIPS <i>(hannocs, chiyoda, dll)</i>	Lampu SL (TL Pendek) 18 W Model jari	buah	PHILIPS								
	Lampu SL (TL Pendek) 20 W Model jari	buah	PHILIPS								
MCB SCHNEIDER <i>(broca, shukaku, dll)</i> tuas warna orange	1 Phasa 6 Ampere	buah	SCHNEIDER								
	1 Phasa 10 Ampere	buah	SCHNEIDER								

<https://ntt.bps.go.id>



VHKK2025.SAU
SEWA ALAT BERAT DAN
UPAH JASA KONSTRUKSI

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

SURVEI HARGA KEMAHALAN KONSTRUKSI

RAHASIA

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT				
1.	Provinsi			
2.	Kabupaten/Kota*)			
3.	Nama Responden			
4.	Alamat Responden			
5.	Nomor Telepon/HP			
6.	Kategori Responden	<input type="checkbox"/> Pedagang Grosir <input type="checkbox"/> Produsen <input type="checkbox"/> Pedagang Eceran <input type="checkbox"/> Dinas PU atau SKPD Lainnya <input type="checkbox"/> Jasa Penyewaan Alat Berat <input type="checkbox"/> Pemborong/Kontraktor		

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS					
URAIAN		JULI 2024	OKTOBER 2024	JANUARI 2025	APRIL 2025
1.	Nama Pencacah				
2.	ID Pencacah				
3.	Tanggal Pencacahan				
4.	Tanda Tangan Pencacah				
5.	Nama Pengawas				
6.	NIP Pengawas				
7.	Tanggal Pengawasan				
8.	Tanda Tangan Pengawas				

BLOK III : KETERANGAN RESPONDEN					
URAIAN		JULI 2024	OKTOBER 2024	JANUARI 2025	APRIL 2025
1.	Nama Pemberi Informasi				
2.	Tanda Tangan				

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
2. Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merk barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen pencacahan untuk menanyakan data harga komoditas amatan survei. Seluruh komoditas/kualitas yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
7. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa, dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri online dari BPS RI (<https://webentry.bps.go.id/shkk>).
8. Dokumen yang sudah dientri disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonsiliasi di BPS Provinsi.

BLOK IV : DATA HARGA ASPAL

PRIORITAS RESPONDEN: 1.PEDAGANG GROSIR 2.PRODUSEN 3.PEDAGANG GROSIR MERANGKAP ECERAN 4.PEDAGANG ECERAN (HARGA TANPA ONGKOS ANGKUT). UNTUK BARANG YANG BERMEREK UTAMAKAN MENCACAH SESUAI DENGAN PERINGKAT MEREK. JIKA TIDAK ADA, PILIH MEREK LAINNYA YANG SETARA.

Komoditas Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Merek	Harga per satuan Standar Juli 2024 (Rp)	Harga per satuan Standar Oktober 2024 (Rp)	Harga per satuan Standar Januari 2025 (Rp)	Harga per satuan Standar April 2025 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspal	Curah Grade 60/70	ton	PERTAMINA					
	Drum Grade 60/70 (155 kg)	drum	PERTAMINA					

BLOK V : DATA SEWA ALAT BERAT (Harga sewa alat <i>all in</i> , termasuk bahan bakar, pelumas, operator dan pembantu operator, tanpa mobilisasi)															
Komoditas Barang	Kualitas Barang	Tenaga Mesin (HP)	Kapasitas (KVA)	Harga Juli 2024			Harga Oktober 2024			Harga Januari 2025			Harga April 2025		
				BBM (per liter)	Pelumas (per liter)	Sewa alat <i>all in</i> per bulan / 200 jam	BBM (per liter)	Pelumas (per liter)	Sewa alat <i>all in</i> per bulan / 200 jam	BBM (per liter)	Pelumas (per liter)	Sewa alat <i>all in</i> per bulan / 200 jam	BBM (per liter)	Pelumas (per liter)	Sewa alat <i>all in</i> per bulan / 200 jam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
EXCAVATOR	Tenaga Mesin < 60 HP														
	Tenaga Mesin 80-140 HP														
BULLDOZER	Tenaga Mesin < 100 HP														
	Tenaga Mesin 100-150 HP														
LOADER	Wheel Loader														
	Bucket 1.0-1.6 m ³														
	Track Loader 75-100 HP														
ROLLER	Tandem Roller 6-8 Ton														
	Tandem Roller 8-10 Ton														
	Vibratory Roller 5-8 Ton														
MOTOR GRADER	Tenaga Mesin ≤ 100 HP														
	Tenaga Mesin > 100 HP														
ASPHALT FINISHER	Kapasitas Hopper ≤ 10 Ton														
	Kapasitas Hopper > 10 Ton														
	Kapasitas Muatan 3-4 m ³														
DUMP TRUCK	Kapasitas Muatan 6-8 m ³														
	Kapasitas 60 KVA														
GENERATOR SET	Kapasitas 80 KVA														
	Kapasitas 135 KVA														

BLOK VI : JASA KONSTRUKSI

(tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, dan lainnya)

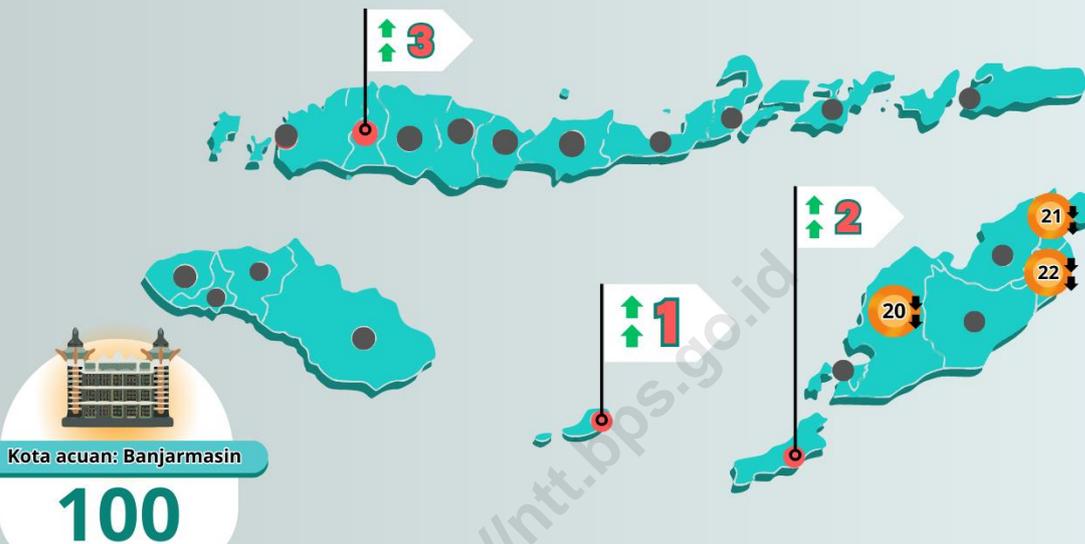
Komoditas Barang	Satuan/Unit	Upah per Satuan/Unit Juli 2024 (Rp)	Upah per Satuan/Unit Oktober 2024 (Rp)	Upah per Satuan/Unit Januari 2025 (Rp)	Upah per Satuan/Unit April 2025 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upah Kepala Tukang	O-H					
Upah Tukang Batu	O-H					
Upah Tukang Kayu	O-H					
Upah Instalatur Listrik	TITIK					
Upah Pembantu Tukang	O-H					
Upah Operator Alat Berat	O-H					
Upah Pembantu Operator	O-H					

BLOK VII : CATATAN

<https://ntt.bps.go.id>

Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024

92,42
Peringkat 34 dari 38 Provinsi



3 Kabupaten dengan IKK tertinggi

01 / Kabupaten Sabu Raijua	115,55
02 / Kabupaten Rote Ndao	108,37
03 / Kabupaten Manggarai	102,79

3 Kabupaten dengan IKK terendah

20 / Kabupaten Kupang	82,56
21 / Kabupaten Malaka	80,07
22 / Kabupaten Belu	77,03



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang - 85111
Telp. (0380) 826289, 821755: Fax. 0380 833124
Website: ntt.bps.go.id; Email: bps5300@bps.go.id